

LAKIP DISPMD



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Tahun 2024**

**PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP SKPD) Tahun 2024. LAKIP DISPMD ini disusun sebagai Laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari perencanaan yang matang, terarah dan tepat sasaran, baik itu volume maupun pembiayaan serta waktu yang akan dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kami menyadari bahwa LAKIP DISPMD ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LAKIP DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DISPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, 31 Januari 2025

**PIET KERALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



IRWAN BASO, S. STP

NIP. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
D. Isu-Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Analisis Capaian Kinerja	45
C. Realisasi Keuangan	78
BAB IV PENUTUP	83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government). Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Tahun 2024, mengacu kepada Perjanjian Kinerja DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DISPMD Kabupaten Kepulauan Selayar mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DISPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga ditujukan sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun Anggaran 2024, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DISPMD ke depannya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan maksud tersebut di atas maka disetiap pelaksanaan penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan pembelanjaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selayaknya dapat dibuatkan pelaporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (LAKIP DISPMD).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISPMD adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Lakip DISPMD ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi capaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DISPMD yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan;

2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesimbangan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana strategis dinas;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Dinas;
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pemerintahan desa;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
- h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyusun rencana kegiatan di bidang pemerintahan desa;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang pemerintahan desa;
 - h. menyiapkan petunjuk dan pedoman kerja serta bimbingan mengenai bidang pemerintahan desa;
 - i. melaksanakan evaluasi penyusunan laporan di bidang pemerintahan desa;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyusun rencana program kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- h. menyiapkan petunjuk yang standar, norma dan pedoman kriteria prosedur kerja serta bimbingan mengenai Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan di Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya
- j. melaksanakan pengembangan manajemen di bidang bina pengembangan dan usaha ekonomi desa
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan
- i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- l. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
- m. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
- n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

penatausahaan keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- p. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Uraian tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

- a. menyusun Instrumen Pemetaan Sosial
- b. mengolah Data Hasil pemetaan Sosial
- c. menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek pergerakan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- e. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas sosial;
- f. menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- g. mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- h. menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
- i. menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan risiko

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

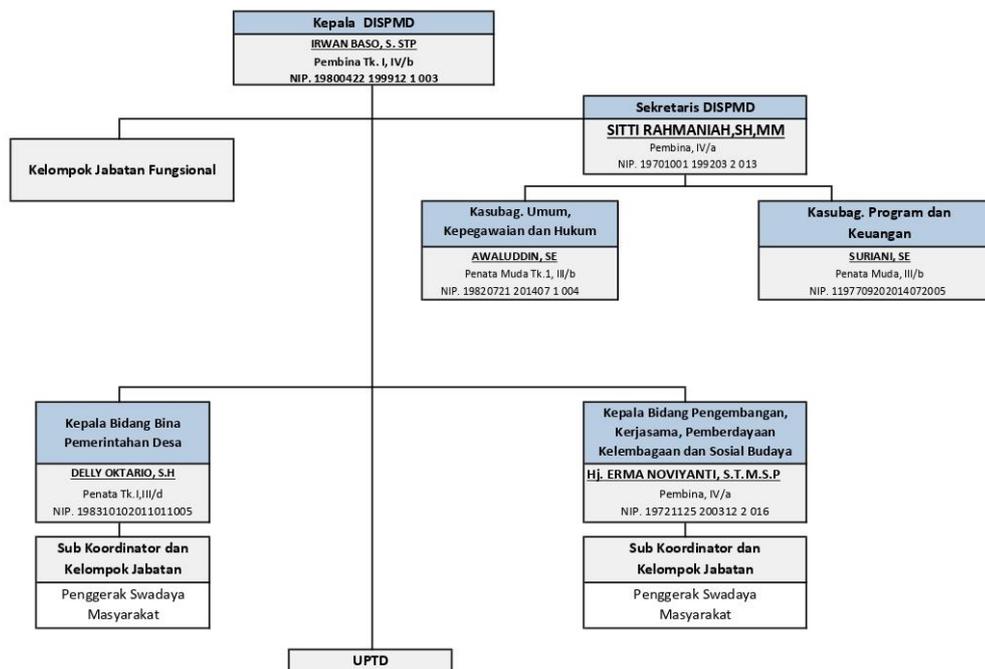
- perubahan;
- j. mengolah data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko perubahan;
 - k. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
 - l. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
 - m. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
 - n. menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
 - o. melaksanakan pelatihan masyarakat;
 - p. menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat;
 - q. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
 - r. melaksanakan pendampingan masyarakat;
 - s. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
 - t. menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
 - u. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan
 - v. berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
 - w. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pembangunan Desa;
 - x. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
 - y. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;
 - z. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai pengawasan berbasis masyarakat;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan dibidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024



Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi struktur jabatan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2024

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
5	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	4
6	Staf PNS	7
7	Staf Kontrak	23
	Jumlah	40

Tabel 1.2
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	4
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	3
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
10.	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
	Jumlah		17

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 1.3 :

Tabel 1.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Meja Rapat	1 buah	Layak
8	Meja Tulis	23 buah	Layak
9	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
10	Kursi Putar	15 Buah	Layak
11	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
12	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
13	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
14	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
15	Sofa	2 Unit	Layak
16	Alat-alat studio	1 set	Layak
17	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
18	Televisi	3 Unit	Layak
19	Kamera	1 Unit	Layak
20	Printer	10 Buah	Layak
21	Kulkas	3 Buah	Layak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anggaran Pokok DISPMD pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.831.800.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.819.760.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.682.040.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.604.542.416,- (Tiga Milyar Enam Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), atau sekitar 94,07%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.
 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	3.801.800.000,00	3.575.442.416,00	94,05
1.1	Belanja Pegawai	1.819.760.000,00	1.644.548.430,00	90,37
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.682.040.000,00	1.630.893.986	96,96
1.3	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000	100,00
2	Belanja Modal	30.000.000,00	29.100.000	97,00
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.100.000	97,00
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	Jumlah	3.831.800.000,00	3.604.542.416,00	94,07

D. ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DISPMD adalah :

1.	Kekuatan	1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Visi dan Misi Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Dukungan Pimpinan
2.	Kelemahan	1. SDM Aparat Dinas PMD terbatas/kurang 2. Anggaran yang belum memadai 3. Penyediaan Kendaraan Dinas yang kurang 4. Rencana Kerja yang belum terakomodir secara maksimal
3.	Peluang	1. Koordinasi lintas instansi terkait 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

		bersinergi dengan Program Pemerintahan Desa 3. Dukungan Masyarakat
4.	Tantangan	1. Luas wilayah geografis dan jangkauan yang sulit khususnya di wilayah Kepulauan. 2. Komitmen dan dukungan alokasi anggaran ke DISPMD yang belum optimal sehingga banyak program kegiatan di RENJA DISPMD tidak dapat dijalankan atau capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan berdasarkan ***tujuan, sasaran dan strategi*** yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman kepada **Visi Pembangunan Daerah** yaitu : “ ***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*** ”.

Sedangkan **Misi** pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat

dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan 3 pilar gambaran kondisi yang diharapkan pada tahun 2026 yaitu :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”.

Dimana ketiga pilar ini dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah dimana program ini memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk dimensi Peningkatan status desa, target peningkatan status desa dalam periode RPJMD yakni sebesar 13 desa yang terdiri dari 3 desa maju (Desa Barugaia, Mekar Indah dan Patilereng), dan 10 Desa Mandiri

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

(Desa Harapan, Bonerate, Buki, Kembang Ragi, Tanete, Bontosunggu, Polebunging, Bontobulaeng, Kalaotoa, dan Batang).

Dari dua dimensi ini, DISPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DiSPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut ini output dan Outcome dari Program unggulan Gerbang sari :

- Output
 - a. Teridentifikasinya BUMDesa yang aktif dan tidak aktif
 - b. Teridentifikasinya solusi dari masalah BUMDesa yang tidak aktif
 - c. Tersusunnya profil BUMDesa
 - d. Meningkatnya klasifikasi BUMDesa yang berperingkat dasar menjadi tumbuh dan seterusnya
- Outcome
 - a. Road map pembinaan BUMDesa yang didukung data dan profil BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. BUMDesa aktif dapat berklasifikasi berkembang bahkan maju

Terkait Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 6 Misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan dengan Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, indikator sasaran Indeks Desa Membangun. Indikator Indeks Desa Membangun terdapat beberapa variable dan indikator yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

mempengaruhi dalam penentuan indeks serta status desa sesuai IDM.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuannya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan
2. Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan yang akan dicapai di atas digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa : - Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal - Persentase Desa berstatus Desa Berkembang - Persentase Desa berstatus Desa Maju - Persentase Desa berstatus Mandiri
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran
		pelayanan perangkat daerah : - Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan - Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah

3. Strategi

Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan strategik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal.

Sesuai kondisi lingkungan internal dengan berbagai kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi eksternal dengan berbagai peluang dan tantangan organisasi ke depan, maka strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan organisasi adalah :

- a. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik
- b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
- d. Mengintensifk an pelatihan peningkatan kapasitas SDM
- e. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa
- f. Pengalih fungsian aset, fasilitas dan sarana perekonomian ke pemerintah desa
- g. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha
- h. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- i. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD
- j. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- k. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- l. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa
- m. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat
- n. Desa yang berperan penting dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan public
- o. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa
- p. Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa
- q. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- r. Peningkatan jumlah desa yang melakukan perjanjian Kerjasama antardesa dan perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga
- s. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
- t. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi fokus utama apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa yang meningkat statusnya	12,34%
		Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	7,4 %
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	58 %
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %
		Persentase Desa berstatus Mandiri	7,4%
2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	77,8

Sumber : Renstra DISPMD Tahun 2021-2026

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yang meliputi sasaran, program, dan kegiatan sangat ditentukan sekali oleh indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target pada masing-masing Sub kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tabel 2.3
 Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,53
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	88
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 % (9 Dok)
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2 Dok
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Dok
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17 Orang /12 Bulan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Lap
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1 Dok
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Lap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Lap
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Lap
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Lap
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16 Unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang di Bina	100%
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1 Dok
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	3 Dok
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1 Dok
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1 Dok
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuhan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Terpilih (Dokumen)	1 Dok (66 orang)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20 LKD (5 Desa)
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1 Lap (10 Klp. TTG)
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1 Dok

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan sejak awal tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Tahun 2024 ini dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Pokok) Tahun Anggaran 2024 serta disajikan pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2022-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

1. Kepala Dinas

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	77,8%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP
4	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Peningkatan status Desa	12,34%

2. Sekretaris

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (penunjang)	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (penunjang)	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional perkantoran (penunjang)	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai (penunjang)	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

3. Bidang Pemerintahan Desa

Tabel 2.6
 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan desa	Cakupan Administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (prioritas)	100%

4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;

Tabel 2.7
 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 2.8
 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Hukum, dan Kepegawaian
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Pajak, dan Perizinannya	7 Unit
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit
11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung yang dipelihara	1 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

6. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tabel 2.9
 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dok
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/12 Bulan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit laptop

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi dapat diukur melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam rencana strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi

Tabel 3.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
sesuai Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia										
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan										
1.	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun (S-2)	Angka	0,6061 (berkem bang)	0,6300 (berkem bang)	0,6650 (berkem bang)	0,7000 (maju)	0,7150 (maju)	0,7300 (maju)	0,7300 (maju)

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa sasaran ketiga RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan indikator Indeks Desa Membangun di tahun kedua (2024) di targetkan sebesar 0,7000 atau dikategori Maju. Capaian IDM Tahun 2023 sebesar 0,6953 (Berkembang). Pada tahun 2024, capaian peningkatan status desa sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan untuk IDM keseluruhan capaian sebesar 0,719 (maju) atau dengan kata lain telah melampaui target yang diharapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan DISPMD dalam pencapaian peningkatan IDM antara lain : 1. Identifikasi rekomendasi IDM yang akan menaikkan Indeks, 2. Memetakan hasil identifikasi agar rekomendasi tersebut dapat dijalankan oleh OPD tekhnis terkait dan pemerintah desa sesuai kewenangan lokal desa, 3. Berkoordinasi dengan OPD terkait setelah hasil pemetaan didapatkan yg tujuannya agar OPD dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut, 4 Melaksanakan rapat kordinasi dengan multi stakeholder (Tenaga Ahli, OPD dan pemerintah desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di OPD dan Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tabel 3.2
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	730102	BONTOHARU	7301022003	BONTOSUNGGU	0,87	0,82	0,93	0,8729	MANDIRI
2	730102	BONTOHARU	7301022004	BONTOBORUSU	0,7	0,63	0,73	0,6879	BERKEMBANG
3	730102	BONTOHARU	7301022005	BONTOLEBANG	0,62	0,58	0,67	0,6243	BERKEMBANG
4	730102	BONTOHARU	7301022006	BONTOTANGNGA	0,87	0,88	0,87	0,8748	MANDIRI
5	730102	BONTOHARU	7301022007	KAHU-KAHU	0,71	0,6	0,53	0,614	BERKEMBANG
6	730102	BONTOHARU	7301022008	KALEPADANG	0,76	0,77	0,53	0,6867	BERKEMBANG
7	730103	BONTOMATENE	7301032003	PAMATATA	0,93	0,82	0,87	0,8697	MANDIRI
8	730103	BONTOMATENE	7301032004	TANETE	0,93	0,87	0,67	0,8197	MANDIRI
9	730103	BONTOMATENE	7301032005	BUNGAIYA	0,75	0,77	0,93	0,8181	MANDIRI
10	730103	BONTOMATENE	7301032006	KAYU BAUK	0,81	0,78	0,6	0,7316	MAJU
11	730103	BONTOMATENE	7301032007	BARAT LAMBONGAN	0,59	0,87	0,67	0,7073	MAJU
12	730103	BONTOMATENE	7301032008	BONTONA SALUK	0,83	0,92	1	0,917	MANDIRI
13	730103	BONTOMATENE	7301032009	ONTO	0,86	0,9	1	0,921	MANDIRI
14	730103	BONTOMATENE	7301032010	MAHARAYYA	0,86	0,8	0,87	0,8432	MANDIRI
15	730103	BONTOMATENE	7301032011	MENARA INDAH	0,84	0,47	0,87	0,7244	MAJU
16	730103	BONTOMATENE	7301032015	TAMALANREA	0,81	0,87	0,93	0,8686	MANDIRI
17	730104	BONTOMANAI	7301042001	PARAK	0,89	0,93	0,87	0,8971	MANDIRI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
18	730104	BONTOMANAI	7301042002	BARUGAIYA	0,95	0,87	0,93	0,9162	MANDIRI
19	730104	BONTOMANAI	7301042003	JAMBUIYA	0,85	0,4	0,67	0,6375	BERKEMBANG
20	730104	BONTOMANAI	7301042004	MARE MARE	0,83	0,72	1	0,8503	MANDIRI
21	730104	BONTOMANAI	7301042005	POLEBUNGING	0,83	0,72	0,67	0,7392	MAJU
22	730104	BONTOMANAI	7301042006	BONEA MAKMUR	0,74	0,57	0,6	0,6365	BERKEMBANG
23	730104	BONTOMANAI	7301042008	BONTOMARANNU	0,89	0,82	1	0,9027	MANDIRI
24	730104	BONTOMANAI	7301042010	BONEA TIMUR	0,74	0,67	0,8	0,7365	MAJU
25	730104	BONTOMANAI	7301042011	BONTOKORAANG	0,76	0,48	0,67	0,6367	BERKEMBANG
26	730104	BONTOMANAI	7301042012	KABURU	0,79	0,6	0,73	0,7073	MAJU
27	730105	BONTOSIKUYU	7301052001	HARAPAN	0,82	0,93	0,8	0,8521	MANDIRI
28	730105	BONTOSIKUYU	7301052002	PATIKARYA	0,75	0,92	0,87	0,844	MANDIRI
29	730105	BONTOSIKUYU	7301052003	PATILERENG	0,84	0,77	0,87	0,8244	MANDIRI
30	730105	BONTOSIKUYU	7301052004	LAIYOLO BARU	0,74	0,8	0,87	0,8013	MAJU
31	730105	BONTOSIKUYU	7301052005	LAIYOLO	0,69	0,77	0,87	0,7749	MAJU
32	730105	BONTOSIKUYU	7301052006	LANTIBONGAN	0,78	0,58	0,6	0,6554	BERKEMBANG
33	730105	BONTOSIKUYU	7301052007	BINANGA SAMBAIYA	0,81	0,78	0,93	0,8408	MANDIRI
34	730105	BONTOSIKUYU	7301052008	LOWA	0,85	0,75	0,93	0,843	MANDIRI
35	730105	BONTOSIKUYU	7301052009	APPATANAH	0,83	0,72	0,67	0,7392	MAJU
36	730105	BONTOSIKUYU	7301052010	TAMBOLONGAN	0,77	0,57	0,67	0,6663	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
37	730105	BONTOSIKUYU	7301052011	POLASSI	0,67	0,5	0,67	0,6137	BERKEMBANG
38	730105	BONTOSIKUYU	7301052012	KHUSUS BAHULUANG	0,77	0,58	0,93	0,7627	MAJU
39	730106	PASIMASUNGGU	7301062001	KEMBANG RAGI	0,86	0,88	0,87	0,871	MANDIRI
40	730106	PASIMASUNGGU	7301062003	MA'MINASA	0,77	0,68	0,6	0,683	BERKEMBANG
41	730106	PASIMASUNGGU	7301062005	TANAMALALA	0,82	0,67	0,6	0,6965	BERKEMBANG
42	730106	PASIMASUNGGU	7301062006	LABUANG PAMAJANG	0,74	0,73	0,6	0,6921	BERKEMBANG
43	730106	PASIMASUNGGU	7301062007	MASUNGKE	0,73	0,67	0,6	0,666	BERKEMBANG
44	730106	PASIMASUNGGU	7301062009	BONTOSAILE	0,76	0,63	0,6	0,6644	BERKEMBANG
45	730106	PASIMASUNGGU	7301062011	TELUK KAMPE	0,66	0,57	0,6	0,6098	BERKEMBANG
46	730107	PASIMARANNU	7301072001	BONERATE	0,85	0,77	0,93	0,8486	MANDIRI
47	730107	PASIMARANNU	7301072002	MAJAPAHIT	0,78	0,78	0,67	0,7443	MAJU
48	730107	PASIMARANNU	7301072003	BATU BINGKUNG	0,7	0,45	0,67	0,6065	BERKEMBANG
49	730107	PASIMARANNU	7301072004	BONEA	0,72	0,48	0,67	0,6233	BERKEMBANG
50	730107	PASIMARANNU	7301072005	LAMBEGO	0,83	0,52	0,67	0,6725	BERKEMBANG
51	730107	PASIMARANNU	7301072006	KOMBA KOMBA	0,63	0,38	0,6	0,5392	TERTINGGAL
52	730107	PASIMARANNU	7301072007	SAMBALI	0,73	0,45	0,67	0,616	BERKEMBANG
53	730107	PASIMARANNU	7301072008	LAMANTU	0,81	0,52	0,67	0,6649	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
54	730108	TAKA BONERATE	7301082001	KAYUADI	0,78	0,5	0,53	0,6035	BERKEMBANG
55	730108	TAKA BONERATE	7301082002	BATANG	0,74	0,65	0,67	0,6865	BERKEMBANG
56	730108	TAKA BONERATE	7301082003	NYIUR INDAH	0,65	0,53	0,67	0,6171	BERKEMBANG
57	730108	TAKA BONERATE	7301082004	TAMBUNA	0,7	0,5	0,67	0,6213	BERKEMBANG
58	730108	TAKA BONERATE	7301082005	JINATO	0,69	0,57	0,67	0,6416	BERKEMBANG
59	730108	TAKA BONERATE	7301082006	RAJUNI	0,71	0,47	0,67	0,6159	BERKEMBANG
60	730108	TAKA BONERATE	7301082007	LATONDU	0,62	0,42	0,6	0,5465	TERTINGGAL
61	730108	TAKA BONERATE	7301082008	TARUPA	0,65	0,48	0,47	0,5319	TERTINGGAL
62	730108	TAKA BONERATE	7301082009	KHUSUS PASITALLU	0,63	0,5	0,67	0,6003	BERKEMBANG
63	730109	PASILAMBENA	7301092001	KALAOTOA	0,71	0,55	0,67	0,6437	BERKEMBANG
64	730109	PASILAMBENA	7301092002	GARAUPA	0,74	0,45	0,67	0,6198	BERKEMBANG
65	730109	PASILAMBENA	7301092003	LEMBANG MATENE	0,7	0,63	0,67	0,6676	BERKEMBANG
66	730109	PASILAMBENA	7301092004	PULO MADU	0,53	0,28	0,67	0,4919	TERTINGGAL
67	730109	PASILAMBENA	7301092005	KARUMPA	0,69	0,43	0,67	0,5971	TERTINGGAL
68	730109	PASILAMBENA	7301092006	GARAUPA RAYA	0,67	0,43	0,67	0,5895	TERTINGGAL
69	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102001	BONTOBULAENG	0,67	0,7	0,47	0,6117	BERKEMBANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
									ANG
70	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102002	BONTOBARU	0,75	0,6	0,6	0,6495	BERKEMBANG
71	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102003	BONTOMALLING	0,72	0,55	0,67	0,6456	BERKEMBANG
72	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102004	LEMBANG BAJI	0,71	0,48	0,67	0,6214	BERKEMBANG
73	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102005	BONTOJATI	0,73	0,67	0,6	0,6641	BERKEMBANG
74	730110	PASIMASUNGGU TIMUR	7301102006	UJUNG	0,73	0,68	0,87	0,7586	MAJU
75	730111	BUKI	7301112001	BUKI	0,84	0,88	0,6	0,7744	MAJU
76	730111	BUKI	7301112002	LALANG BATA	0,84	0,85	0,67	0,7856	MAJU
77	730111	BUKI	7301112003	BALANG BUTUNG	0,82	0,67	0,67	0,7187	MAJU
78	730111	BUKI	7301112004	KOHALA	0,87	0,62	0,67	0,7192	MAJU
79	730111	BUKI	7301112005	BONTOLEMPANGAN	0,93	0,97	0,93	0,9419	MANDIRI
80	730111	BUKI	7301112006	MEKAR INDAH	0,92	0,75	0,93	0,8678	MANDIRI
81	730111	BUKI	7301112007	BUKI TIMUR	0,82	0,77	0,67	0,7502	MAJU
					0,769	0,661	0,728	0,719	Maju

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD di atas dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam melakukan pengukuran Kinerja, terdapat 5 (lima) program yang menjadi kewenangan DISPMD, namun pada tahun 20214 hanya 3 (Tiga) program yang dijalankan (2 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah). Hal ini di sebabkan karena adanya keterbatasan anggaran (pengurangan anggaran) yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program dan kegiatan DISPMD Tahun 2024 yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan” berdasarkan sasaran indikator kinerja sasaran yang ada yaitu:

1. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 5) Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota"

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat"

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- 2) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 3) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis/Indikator Kinerja Kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Sasaran/program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	-
		Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	3,7%	-
		Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100% (81 Desa)
		Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33%	33,33%
		Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	63,15%	48,14

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- a. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi

Penataan desa meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), dan aspek kewenangan Desa. Penataan Desa pada tahun 2024 tidak terselenggara dikarenakan pada tahun 2024

Program Penataan Desa tidak dilaksanakan disebabkan keterbatasan anggaran.

b. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Namun pada tahun 2024 tidak ada peningkatan kerjasama desa (Kerjasama baru) yang terbentuk meskipun telah dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa di 15 Desa. Hal ini disebabkan belum adanya kesiapan masing-masing desa dari segi anggaran dan sumber daya manusia.

c. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa dan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

d. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2024, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan

fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari 20 LKD dari 5 Desa. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 10 desa sasaran yaitu : Desa Tamalanrea, Desa Kaburu, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa Tanete, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, dan Desa Bonea Timur, serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan di 81 desa. Target pada tahun 2024 sebesar 33,33% sesuai indikator program pada renstra, dan berdasarkan capaian dari setiap target sub kegiatan, dimana masing-masing mencapai 100%, maka dalam hal ini dapat dikatakan target 33,33% tercapai atau sebesar 100% dari target capaian masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan.

e. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Desa dengan status swasembada merupakan status yang digunakan pada penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terakhir digunakan sampai pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, penilaian status desa berpedoman pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 5 Kategori status desa dengan 3 Dimensi Penilaian yang terdiri dari beberapa indikator penilaian. Terdapat perbedaan indikator penilaian pada IDM dan IPD, sehingga target status desa swasembada (desa maju) pada IPD sebesar 63,15% tidak tercapai, dikarenakan status Desa maju pada IPD belum tentu masuk dalam kategori desa maju pada IDM, disebabkan perbedaan indikator penilaian, sehingga desa swasembada jika disandingkan dengan desa maju pada IPD persentasenya sangat menurun. Untuk memperoleh nilai persentase desa swasembada dengan melihat Indeks Desa Membangun, dengan asumsi desa maju dan desa mandiri sebagai desa swasembada, maka untuk tahun 2024 terdapat 39 desa swasembada atau sebesar 48,14% yang terdiri dari 17 Desa Maju (Desa Kayu Bauk, Desa Barat Lambongan , Desa Menara Indah, Desa Polebunging, Desa Bonea Timur, Desa Kaburu,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Appatanah, Desa Khusus Bahuluang, Desa Majapahit, Desa Ujung, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Balang Butung, Desa Kohala, Desa Buki Timur) dan 22 desa mandiri (Desa Bontosunggu, Desa Bontotangga, Desa Pamatata, Desa Tanete, Desa Bungaiya, Desa Bontona Saluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Parak, Desa Barugaiya, Desa Mare-Mare, Desa Bontomarannu, Desa Harapan, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Binanga Sombaiya, Desa Lowa, Desa Kembang Ragi, Desa Bonerate, Desa Bontolempangan, Desa Mekar Indah), sehingga terdapat peningkatan sebesar 9,87% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 38,27%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Sasaran Target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar kesesuaian dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Persentase Desa yang meningkat statusnya	12,34%	18,51%
	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	0
		Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	7,4%	7,41%
		Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	58%	44,44%
		Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2%	20,99%
		Persentase Desa berstatus Mandiri	7,4%	27,17%
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	Proses
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Proses
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP	Proses
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	77,8	84,63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Berdasarkan table 3.3 di atas, diketahui bahwa :

1. Pada saat penyusunan laporan ini, untuk nilai SAKIP 2024 masih dalam proses sehingga belum diketahui realisasinya. Untuk Nilai SAKIP OPD Tahun 2023 telah memenuhi target yakni dari kategori CC di tahun 2022, meningkat menjadi B.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada jenis layanan dan kualitas layanan. Jenis pelayanan yang menjadi objek penilaian sesuai dengan fungsi layanan yang terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa tersebut dalam kaitannya dengan survey tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2023 yaitu layanan (1) Surat keterangan/rekomendasi, (2) layanan Dokumen/Data dan informasi, (3) Konsultasi tentang pencairan dana, (4) Pemberdayaan masyarakat/perempuan dan SDM. (5) tanda tangan SPPD, surat keterangan dan rekomendasi.

Sedangkan untuk kualitas layanan dilakukan penilaian kepuasan terhadap beberapa unsur yaitu 1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, (2) Kemudahan prosedur/alur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, (5) Kesesuaian Jenis layanan, (6) Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, (8) Kualitas sarana dan prasarana, dan (9) Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Target IKM pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian kualitas layanan terhadap semua unsur pelayanan yang diberikan oleh Dinas PMD dan apa yang dirasakan responden dalam menerima layanan tercapai (target 2024: 77,8) dimana tingkat kualitas layanan (nilai rata-rata) sebesar 84,63 (kategori baik), dan juga meningkat jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,13 %, dimana dilai pada tahun 2023 sebesar 78,5 (kategori baik).

3. Laporan Keuangan OPD tahun 2024 dengan target sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sampai saat ini masih dalam proses penyusunan laporan.
4. Persentase Desa yang meningkat statusnya
 Pada tahun 2024 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 12,34% atau sebesar 10 desa yakni sebesar 17,28% atau sebanyak 14 desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024

NO.	STATUS DESA	2023	%	2024	%
1	Mandiri	14	17,28	22	27,17
2	Maju	17	20,99	17	20,99
3	Berkembang	42	51,85	36	44,44
4	Tertinggal	8	9,88	6	7,41
5	Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tabel 3.6
Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024

No.	Status Desa	Target 2024 (%)	2023	2024	Status Tetap (sama dengan tahun 2023)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2023)	% Peningkatan (capaian)
1	Mandiri	7,4%	14	22	14	8	27,17
2	Maju	27,2%	17	17	13	4	20,99
3	Berkembang	58%	42	36	34	2	44,44
4	Tertinggal	7,4%	8	6	6		7,41
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0		0,00
	Jumlah	100	81	81	81	14	100,00

a. Persentase Desa Berstatus Sangat Tertinggal

Sejak tahun 2022-2024 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini sesuai target 0% yang diharapkan, tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal atau tidak ada desa yang menurun statusnya dari desa tertinggal kembali menjadi desa sangat tertinggal.

b. Persentase Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa tertinggal pada tahun 2024 sebanyak 6 desa atau sebesar 7,4% (mencapai target), dimana target capaian untuk tahun 2024 sebesar 7,4%, atau sebanyak 6 desa. 6 desa dimaksud yaitu Desa Komba-Komba, Latondu, tarupa, Pulau madu, Karumpa dan Garaupa Raya,

c. Persentase Desa Berstatus Desa Berkembang

Persentase Desa Berkembang pada tahun 2024 sebesar 44,44% atau sebesar 36 desa. Pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 42 desa. Terdapat 2 desa tertinggal yang meningkat statusnya desa berkembang, dan terdapat masing-masing 4 desa berkembang meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

d. Persentase Desa Berstatus Desa Maju

Jumlah Desa Maju Pada Tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 17 Desa atau sebesar 20,98%, dikarenakan 4 desa maju di tahun 2023 diantaranya meningkat statusnya menjadi desa mandiri, serta terdapat tambahan 4 desa baru dengan status berkembang di tahun 2023 menjadi desa maju di tahun 2024.

e. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2024 melampaui target, dimana untuk tahun ke- Empat periode RPJMD ditargetkan 6 desa mandiri atau sebesar 7,4%, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini di kabupaten kepulauan selayar, desa mandiri meningkat menjadi 22 desa atau sebesar 27,16%, yaitu :

1. Desa Barugaia, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,9162 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,9162, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
2. Desa Patilereng terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8244 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8244, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
3. Desa patikarya kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8273 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,844, Dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan ekonomi.
4. Desa Harapan terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2022 sebesar 0,7757 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- 0,8337, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
5. Desa Bontosunggu terletak di kecamatan bontoharu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8671 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8729, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan indeks ketahanan ekonomi.
 6. Desa Tanete terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8197 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8197, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
 7. Desa Bungaiya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8181 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8181, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
 8. Desa Bontona saluk terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,917 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,917, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
 9. Desa Onto terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,921, dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,921, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
 10. Desa Maharayya terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,9338 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,8432, tapi masih tetap pada rentang indeks desa mandiri, dimana penurunan terjadi pada semua dimensi yaitu indeks

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

11. Desa Tamalanrea terletak di kecamatan Bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8686 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8686, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
12. Desa Bonerate terletak di kecamatan Pasimarannu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8317 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8486 dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, dan indeks ketahanan ekonomi.
13. Desa Bontolempangan terletak di kecamatan Buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,941 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,941, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
14. Desa Mekar Indah terletak di kecamatan buki dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8678 dan pada tahun 2024 tetap sebesar 0,8678, tidak ada peningkatan ataupun penurunan pada semua dimensi.
15. Desa Bontotangga di kecamatan Bontoharu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8062 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8784, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan lingkungan.
16. Desa Pamatata terletak di kecamatan bontomatene dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,7979 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8697, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

17. Desa Parak terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,6335 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8971, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
18. Desa Mare-Mare terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,606 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8503, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
19. Desa Bontomarannu terletak di kecamatan bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,7 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,9027, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
20. Desa Binanga Sombaiya terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,6759 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,8408, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
21. Desa Lowa terletak di kecamatan bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023 sebesar 0,8154 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,843, dimana peningkatan terjadi pada indeks ketahanan lingkungan
22. Desa Kembang Ragi terletak di kecamatan pasimasunggu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

2023 sebesar 0,739 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,871, dimana peningkatan terjadi pada semua indeks, yaitu indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

Pada Tahun 2024, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dari 5 (lima) program yang menjadi kewenangan DISPMD, hanya 3 (Tiga) program yang dijalankan (2 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah).

Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun anggaran 2024 berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 22.995.500,- (Dua Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.017.100.00,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 74,01 %, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.995.500 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.148.000,- (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 65,01 % dengan output tersusunnya Dokumen Renja Pokok dan Renja Perubahan SKPD
 - b. PenKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.557.200,- (Satu Juta Lima Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 82,86 %, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.591.400,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 79,57%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupian Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.659.300,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 82,97%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2024.
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.716.800,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 85,84 %, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2024.
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.598.800,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 79,94 %, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.645.800,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 82,28%, dengan output

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.460.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.762.856.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96, 89 %, dengan uraian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.811.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.630.377.071,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 90,00% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.623.900,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 81,20 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000. 000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.654.800,- (Satu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 82,74 % dengan output tersedianya Laporan bahan tanggapan dari hasil pemeriksaan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.246.893.500 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 238.585.219,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 96,63%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 30.108.700,- (Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.194.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 83,68%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.685.200,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.496.800,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 88,81%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.781.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.164.900,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 66,38 %, dengan output tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.968.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

sebesar 100%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.

- e. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 205.350.600,- (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 204.761,719,- (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 99,71%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97,00%, dengan rincian sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 29.100.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 97%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit laptop yang akan menunjang kelancaran administrasi.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 198.032.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 184.587.387,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 93,21 %, dengan rincian sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 84.032.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 75.606.490,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 89,97 %, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 114.000.000- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 108.980.897- (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,60 %, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.279.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.73.620.380- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 83,40 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.130.000,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 37.431.000,- (Tiga Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 91,01%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 34.480.000- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 27.309.380,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 79,20%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 4.470.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 690.500,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 15,45% . Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 8.199.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 8.189.500,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,88%. Adapun Output, terpeliharanya teras kantor dan ventilasi ruangan kantor.

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa,

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.858.300,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 241.985.800,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 98,41%, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 49.893.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu) dan terealisasi sebesar Rp. 49.432.500,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,08 % dengan ouput 81 Desa yang tertata Administrasi Pemerintahannya.
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.528.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.737.000,- (

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 92,49 % dengan output kegiatan 3 (tiga) Produk Hukum Desa antara lain :

- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, tanggal 29 Februari 2024.
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 61/I/Tahun 2024, tanggal 26 Januari 2024.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa, tanggal 29 November 2024
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.579.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.773.000,- atau 94,47 % dengan output kegiatan adalah telah di fasilitasi 81 Desa terkait Pengelolaan Keuangan.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan output kegiatan telah melakukan pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa di 15 Desa yaitu Desa Patilereng, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Patikarya, Desa Binangasombaya, Desa Lowa, Desa Parak, Desa Kohala, Desa Bungaiya, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Kayu Bauk, Desa Bontotangnga, Desa Maharayya, Desa Barat Lambongan, dan Desa Buki Timur.

Dari hasil pembinaan BUMDES, terdapat beberapa desa yang Bumdesnya belum berkembang disebabkan tidak adanya anggaran/penyertaan modal dari pemerintah desa. Disamping itu, beberapa Bumdes juga masih kekurangan pengurus yang kompeten.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar, di tahun 2024, terdapat 57 bumdes yang aktif, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif. Rincian bumdes yang ada di Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2		4	6	7
1	BONTOHARU	BONTOTANGNGA	Tatanan Baru	√	-
2		BONTOSUNGGU	BUMDes Lestari	√	-
3		KALEPADANG	Usaha Ekonomi Rakyat	√	-
4		BONTOBORUSU	Maccini Sombala	-	√
5		KAHU-KAHU	Je'ne Kahu-Kahu	-	√
6		BONTOLEBANG	Gusung Jaya	√	-
7	BONTOSIKUYU	HARAPAN	Berkah Harapan	√	-
8		LOWA	Benteng Sudu-Sudu	√	-
9		APPATANAH	Sipakullong	√	-
10		LAIYOLO BARU	Laybar Jaya		√
11		LANTIBONGAN	Baji'minasa	√	-
12		PATIKARYA	Terang Surya	√	-
13		PATILERENG	Baloka Mandiri	√	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2		4	6	7
14		BINANGA SOMBALAIYA	Jaya Bhineka	√	-
15		LAIYOLO	Batu Putih	√	-
16		TAMBOLONGAN	Bonto Bulaeng	√	-
17		POLASSI	Surya Mandiri	√	-
18		KHUSUS BAHULUANG	Jaya Abadi	√	-
19		BONTOMANAI	POLEBUNGONG	Karya Bersama	-
20	MARE-MARE		Panca Usaha	√	-
21	BONEA MAKMUR		Harapan	-	√
22	JAMBUIYA		Abadi Jaya	√	-
23	BONTOMARANNU		Marannu	√	-
24	BONEA TIMUR		Bintang Timur	√	-
25	BARUGAIYA		Baruga Bersatu	√	-
26	PARAK		Mitra Jaya	√	-
27	BONTOKORAANG		Masagena	√	
28	KABURU		Bukit Harapan	√	-
29	BUKI	BUKI	Buki Mandiri	-	√
30		LALANG BATA	Pesona Bakti	-	√
31		BALANG BUTUNG	Karya Bersama	-	√
32		KOHALA	Minasatekne	√	-
33		BONTOLEMPANGAN	Assamaturu	√	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS		
				AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2		4	6	7	
34		MEKAR INDAH	Semangat Baru	√	-	
35		BUKI TIMUR	Buki Mandiri	√	-	
36	BONTOMATENE	BARAT LAMBONGAN	Tanjung Harapan	√	-	
37		BONTONA SALUK	Sejahtera	√	-	
38		PAMATATA	Tanah Pesisir	√	-	
39		ONTO	Passiana'	√	-	
40		MAHARAYYA	Suka Maju	-	√	
41		TANETE	Bumdes Tanete	√	-	
42		MENARA INDAH	Mercusuar Mandiri	-	√	
43		BUNGAIYA	Pesona Mandiri	√	-	
44		KAYU BAUK	Kaili Mandiri	√	-	
45		TAMALANREA	Semangat Baru	√	-	
46		PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	Kembang Ragi Jaya	√	-
47			MAMINASA	Baji' Minasa	-	√
48	TANAMALALA		Sentosa	-	√	
49	LABUANG PAMAJANG		Teluk Harapan	√	-	
50	MASSUNGKE		Mitra Sejati	√	-	

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2		4	6	7
51		BONTOSAILE	Cahaya Maju	√	-
52		TELUK KAMPE	Anugrah Jaya	√	-
53	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBULAENG	Maju Bersama	√	-
54		BONTOBARU	Baji' Pa'mai	-	√
55		BONTOMALLING	Usaha Baru	-	√
56		LEMBANG BAJI	Bonesialla	-	√
57		BONTOJATI	Maju Bersama	√	-
58		UJUNG	Cahaya Ujung	-	√
59		PASILAMBENA	KALAOtoa	Kalaotoa Jaya	√
60	LEMBANG MATENE		Muda Mandiri	√	-
61	GARAUPA		Mandiri Bersama	√	-
62	PULO MADU		Bumi Putra Mandiri	-	√
63	KARUMPA		Karya Mandiri	√	-
64	GARAUPA RAYA		Berkah Abadi	√	-
65	TAKABONERATE	KAYUADI	Masoong Baji	-	√
66		JINATO	Sifamase Mase	-	√
67		TARUPA	Harapan Maju	-	√
68		NYIUR INDAH	Passengkaang	√	-
69		LATONDU	Sipatuo	-	√
70		RAJUNI	Tunas Mulia	-	√
71		BATANG	Passamaturukang	√	-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2		4	6	7
72		TAMBUNA	Pasir Putih	-	√
73		KHUSUS PASITALLU	Barakke'	√	-
74	PASIMARANNU	BONEA	Taka Bassi	-	√
75		BATU BINGKUNG	Anugerah Sejahtera	√	-
76		LAMBEGO	Kalao Lambego	√	-
77		MAJAPAHIT	Abadi	√	-
78		BONERATE	Karya Mandiri	√	-
79		KOMBA-KOMBA	Kembang Mekar	√	-
80		SAMBALI	Batu Payung	√	-
81		LAMANTU	Pasimarannu Sejahtera	√	-
Jumlah				57	24

Sumber Data : Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan, dan sosial Budaya, DISPMD Tahun 2024

- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan output kegiatan Pengukuhan Kembali Jabatan kepala desa terpilih dapatkan Penambahan Masa Jabatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendapatkan Penambahan Masa Jabatan Masa Bakti 2018–2024 dan 2019-2025, masing masing sebanyak 13 dan 53 Kepala Desa.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Adapun Kegiatan dari program ini adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.184.141.700,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.179.999.400,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah atau 99,65% dengan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan Kapasitasnya yang didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 16.624.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.619.000,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 81,92%, dengan output 20 LKD yang telah ditingkatkan Kapasitasnya dari 5 Desa
2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tega Guna, dengan anggaran sebesar Rp. 12.517.700,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.890.800,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 94,9%, dengan output kegiatan, 10 Kelompok TTG yang difasilitasi tepatnya di Desa Tamalanrea, Desa Kaburu, Desa Buki, Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Bungaiya, Desa

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tanete, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, dan Desa Bonea Timur

3. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.154.489.600,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 99,69%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Tabel 3.7
Matriks Reviu Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja	70,28%	98,89%	100%
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan	85%	94,07%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
		Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Keuangan dan LAKIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (LPPD dan LKPJ)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20 Orang /12 Bulan	20Orang /12 Bulan	100%
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
	3.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang	100%	100%	100%
	1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Lap	1 Lap	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
			Daerah pada SKPD			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum kantor	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100%
	5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100%
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	100%	100%
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	100%
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	100%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
IV.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang	100%	100%	100%
	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	1 Dok	1 Dok	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa			
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dok	3 Produk Hukum	100%
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dok	1 Dok	100%
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dok	1 Dok	100%
5.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih yang diukuhkan kembali (Penambahan Masa Jabatan)	66 Orang	66 Orang (Kepala Desa)	100%
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (%)	33,33%	33,33%	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100	100	100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Indikator	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2		3	4	5	6
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 LKD	20 LKD	100%
2.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lap	1 Lap	100%
3.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dok	1 Dok	100%

Beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 antara lain:

- Secara umum permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini adalah minimnya pengalokasian anggaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semakin minimnya anggaran dari tahun ke tahun, juga berpengaruh pada capaian kinerja kegiatan misalnya ada kegiatan/program tahun sebelumnya yang seharusnya berlanjut di tahun berikutnya, akan tetapi karena tidak lagi dianggarkan sehingga target capaian kinerja tidak tercapai.

Dengan permasalahan diatas, diharapkan kepada para pengambil kebijakan terkait pembagian alokasi anggaran ke SKPD khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk alokasi anggaran ke depannya dapat ditingkatkan.

C. REALISASI KEUANGAN

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024, anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 3.831.800.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 3.604.542.416,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), atau sekitar 94,07% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Tabel 3.8
Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.831.800.000	3.604.542.416	94,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.995.500	17.017.100	74,01
1.	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	10.955.000	7.148.000	65,01
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.657.200	82,86
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.591.400	79,57
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.659.300	82,97
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.716.800	85,84
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	1.598.800	79,94
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.654.800	82,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.460.000	1.639.667.800	90,11
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.815.600.000	1.636.388.430	90,33
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.623.900	81,20
3.	Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000	1.654.800	83,68
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0	0

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.893.500	238.585.210	96,63
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.108.700	25.194.000	83,68
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.685.200	1.496.600	88,81
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.781.000	5.164.900	66,38
4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.968.000	1.968.000	100
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.350.600	204.761.710	99,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	29.100.000	97
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.100.000	97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.032.000	184.587.387	93,04
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.032.000	75.606.490	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	108.980.897	89,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.279.000	73.620.000	83,33
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.130.000	37.431.000	91,01
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	34.480.000	27.309.000	79,20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Lapangan			
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.470.000	690.500	15,45
4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.199.000	8.189.500	99,88
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	245.858.300	241.965.800	98,41
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	245.858.300	241.965.800	98,41
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	49.893.000	49.432.500	99,08
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10.528.000	9.737.000	92,49
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14.579.000	13.773.000	94,47
4.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	20.858.300	19.023.300	91,20
5.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	150.000.000	150.000.000	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.184.141.700	1.179.999.000	99,65
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	1.184.141.700	1.179.999.000	99,65

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Kabupaten/Kota			
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.624.000	13.619.000	81,92
2.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12.517.700	11.890.800	94,9
3.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.155.000.000	1.154.489.600	99,96
	JUMLAH	3.831.800.000	3.604.542.416	94,07

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU: No.1-4) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK: No. 5-9) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD tahun 2024 yakni (target : B).
2. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) tahun 2024 sebesar 84,63%. Realisasi ini di atas target, Dimana pada tahun 2024, target IKM sebesar 77,8%.
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, dengan asumsi SAP (proses)
4. Capaian Persentase Desa yang meningkat statusnya pada tahun 2024 jauh melampaui target (12,34%) yakni sebesar 18,51%.
5. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100% (sesuai target)
6. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 33,33% (sesuai target).

B. SARAN

Hasil pembangunan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2024, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 31 Januari 2025

Plt. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**



IRWAN BASO, S. STP

NIP. 19800422 199912 1 003